BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang titik fokusnya yaitu mencakup perubahan-perubahan besar dalam suatu struktur sosial, tindakan sosial, kelembagaan nasional hingga percepatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dr. Sadono Sukirno menyatakan bahwa pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang, yang artinya dalam pembangunan ekonomi terdapat suatu proses perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik salah satunya yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita suatu negara yang berlangsung dalam jangka panjang.¹

Pembangunan ekonomi memiliki serangkaian proses atau usaha yang tak lain yaitu dengan meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui kegiatan penanaman modal, penggunaan teknologi, peningkatan ilmu pengetahuan, peningkatan keahlian dan keterampilan, peningkatan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Salah satu indikator yang merefleksikan keberhasilan suatu pembangunan ekonomi suatu negara yaitu dengan melihat tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan rata atau tidaknya kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Dengan demikian, semakin tingginya pertumbuhan ekonomi maka semakin

¹ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI dengan Bima Grafika), 1985, hlm. 13.

tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang memandang pembangunan ekonomi sangat penting untuk memperbaiki beberapa masalah atau isu yang berkembang hingga saat ini. Sejak Orde Baru, strategi yang dianut Indonesia lebih berfokus kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan sedikit mengabaikan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pada masa pemerintahan ini, Indonesia memfokuskan diri pada pembangunan di bidang perekonomian, ditandai dengan adanya *grand planning* pembangunan yaitu Repelita yang dimulai tahun 1969 dimana pembangunan perekonomian fokus pada upaya meningkatkan investasi luar negeri dan perdagangan. Pembangunan ekonomi hanya dipusatkan di Pulau Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya dan hanya pada sektor-sektor tertentu. Pemerintah pada saat itu percaya bahwa hasil dari pembangunan itu akan menetes ke sektor-sektor dan wilayah lainnya di Indonesia. Menetes yang dimaksudkan adalah bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai nantinya dapat memberikan manfaat kepada seluruh penduduk.

World Bank melalui laporan publikasinya dengan judul *Indonesia Economic Prospects*, Desember 2020: Menuju Pemulihan yang Aman dan Cepat, meninjaubahwa pada pembukaan kembali perekonomian Indonesia pada 2021 dinilai stabil seiring dengan berkurangnya pembatasan sosial (yang diakibatkan oleh wabah *Corona Virus 2019* atau *COVID-19*) hingga tahun 2022, pertumbuhan akan bangkit ke angka 4,4% pada tahun 2021. Konsumsi dan investasi yang meningkat akan semakin memperkuat pertumbuhan mencapai angka 4,8% pada tahun 2022 seiring meningkatnya kepercayaan konsumen, didukung ketersediaan vaksin yang efektif dan aman bagi sebagian besar penduduk. Disamping itu, World Bank mengingatkan

bahwa perekonomian Indonesia dan global masih berisiko tinggi mengalami penurunan. Pertumbuhan mungkin turun ke angka 3,1% pada tahun 2021 dan 3,8% pada tahun 2022 di bawah skenario yang menurun akibat diperketatnya pembatasan mobilitas di Indonesia dan melemahnya pertumbuhan dan harga-harga komoditas di tingkat global.

World Bank juga menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Indonesia untuk memastikan dan mempercepat pemulihan melalui beberapa kebijakan yang salah satunya yaitu dengan meningkatkan reformasi struktural untuk mendorong investasi, produktivitas dan modal manusia, serta meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia.²

Berbicara mengenai investasi, pada dasarnya investasi merupakan kreativitas seseorang untuk mendapatkan suatu keuntungan. Investasi adalah aktivitas menanamkan sejumlah dana untuk dikembangkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan di masa depan untuk memperoleh profit atau keuntungan. Investasi adalah salah satu cara untuk melawan tingkat inflasi.

Indonesia menawarkan berbagai macam jenis investasi kepada warga negaranya. Bagi seseorang dan/atau suatu organisasi atau badan usaha yang akan melakukan investasi, terdapat banyak alternatif yang dapat digunakan, sebagai contoh investasi dapat dilakukan antara lain dengan cara menabung, membeli tanah dan bangunan, membeli emas, maupun investasi pada pasar modal.

² World Bank, *Indonesia Economic Prospects, Desember 2020: Menuju Pemulihan yang Aman dan Cepat*, diakses melalui *Indonesia Economic Prospects, Desember 2020: Menuju Pemulihan yang Aman dan Cepat* (worldbank.org) diakses pada tanggal 6 Februari 2021

Sumber investasi atau pendanaan merupakan faktor penting yang mempengaruhi kelangsungan dan pengembangan suatu usaha. Para pelaku usaha idealnya memiliki beberapa caranya tersendiri untuk mendapatkan sumber pendanaan, baik dana yang bersumber dari dalam maupun dari luar perusahaan. Pendanaan dari dalam perusahaan biasanya memakai laba usaha yang ditahan. Untuk pendanaan dari luar perusahaan, yaitu dapat berupa utang, penyertaan dengan bentuk saham maupun penerbitan surat utang (Obligasi). Pendanaan dengan penyertaan pada dasarnya dilakukan dengan menjual sebagian saham kepada perseorangan atau badan hukum, yang dikenal dengan Penawaran Umum (*Go Public*). Penawaran umum merupakan kegiatan penawaran sejumlah Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal beserta Peraturan pelaksana lainnya.

Investasi saham dinilai sebagai instrumen investasi yang memiliki tingkatrisiko yang jauh lebih tinggi daripada obligasi, dikarenakan bahwa nilai dari saham memiliki tingkat fluktuatif yang sangat tinggi (saham pada jam pembukaan bursa efekdengan jam penutupan memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk mempunyai nilai yang berbeda) disebabkan oleh karena selain dipengaruhi oleh perusahaan sendiri namun juga banyak faktor pasar lainnya yang menentukan fluktuasi dari nilai saham itu sendiri, sementara obligasi memiliki tingkat fluktuatif yang relatif rendah.

Belakangan ini, obligasi sangat lazim digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pelaku usaha. Investasi obligasi merupakan salah satu investasi yang diminati oleh pemodal karena memiliki pendapatan yang bersifat tetap. Pendapatan tetap tersebut diperoleh dari bunga yang akan diterima secara periodik dan pokok obligasi pada saat jatuh tempo. Bagi Emiten, obligasi merupakan sekuritas yang aman

karena biaya emisinya lebih murah daripada saham. Penerbitan obligasi juga untuk menghindari penilaian jelek Investor dibandingkan jika perusahaan menerbitkan saham baru.³ Hal tersebut disebabkan karena dengan penerbitan saham baru maka akan membuat harga saham akan mengalami penurunan atau dilusi.

Obligasi dalam Pasar Modal Indonesia telah berkembang sejak tahun 1990, dimana Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia disebut *government bond*, sementara obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun badan usaha swasta adalah obligasi korporasi (*corporate bond*). Obligasi ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum (*Initial Public Offering*).

Penerbitan obligasi korporasi dilakukan karena kebutuhan dana perusahaan, baik untuk melakukan ekspansi maupun untuk memenuhi kebutuhan keuangan perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan penting yang menjadi latar belakang perusahaan dalam menerbitkan obligasi antara lain seperti, jumlah dana yang dibutuhkan akan lebih fleksibel nilainya sesuai dengan kemampuan pasar dalam menyerap kebutuhan obligasi tersebut, serta kemampuan pihak penjamin emisi dalam memberikan komitmen jumlah penerbitan obligasi.⁴

Dalam praktik dunia investasi juga ada yang disebut dengan Surat Promes, atau yang sering disebut dengan Surat sanggup bayar. Istilah ini dalam akuntansi disebut sebagai “nota yang dapat diuangkan” yang akan dijadikan sebagai suatu kontrak dan didalamnya klausul-klausul perjanjian yang termuat didalam

³ Suad Husnan, *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka Panjang)*, (Yogyakarta: BPF, 2000), hlm. 34.

⁴ M. S. Tumanggor, *Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Uang, Pasar Modal, dan Penanaman Modal*, (Bekasi: F Media, 2017), hlm.137.

kewajiban-kewajiban pihak yang terlibat didalamnya. Promes ini juga dapat digunakan sebagai pembiayaan untuk keperluan pendanaan, namun berbeda dengan surat pengakuan hutang.

Tujuan utama seorang Investor menginvestasikan dananya pada suatu sekuritas adalah untuk memperoleh hasil (*yield*) dari investasi tersebut. Obligasi akan memberikan penghasilan tetap kepada pemilik obligasi yaitu berupa kupon bunga dan pokok utang dengan waktu jatuh tempo yang sudah ditentukan. Keuntungan yang diperoleh Investor dalam berinvestasi pada obligasi selain dari pendapatan tetap berupa kupon atau bunga yang dibayarkan setiap periode, juga diperoleh dari adanya keuntungan atas penjualan obligasi (*capital gain*) yang dapat dilihat dari perubahan harga yang terjadi pada suatu obligasi. Berdasarkan perkembangan perdagangan pasar obligasi tersebut, tentunya perlu diketahui bagaimana sebenarnya persepsi Investor selama melakukan investasi pada obligasi. Persepsi Investor terhadap obligasi dapat dicerminkan oleh likuiditas dari suatu obligasi. Likuiditas obligasi dapat dipantau dari frekuensi perdagangan obligasi di pasar modal.⁵

Obligasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan (*corporate bond*) menjadi obligasi yang paling diminati oleh Investor pasar modal. Salah satu faktor pendorong tingginya minat Investor asing memburu obligasi korporasi ialah tingkat hasil (*yield*) yang lebih tinggi dibandingkan dengan (*yield*) obligasi pemerintah. Tingkat hasil obligasi korporasi berkisar sekitar 8% (delapan persen) hingga 15% (lima belas persen), sedangkan hasil obligasi pemerintah berkisar hanya 6,4% (enam koma empat persen), sehingga obligasi korporasi menjadi target para Investor. Hasil atau

⁵ Monica Krisnilasari, *Analisis Pengaruh Likuiditas Obligasi, Coupon dan Jangka Waktu Jatuh Tempo Obligasi Terhadap Perubahan Harga Obligasi di Bursa Efek Surabaya*, Tesis Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

keuntungan dari obligasi dapat dikatakan baik jika hasil yang didapatkan semakin tinggi yaitu diatas 10% (sepuluh persen).

Mendapatkan dana yang besar dari hasil penjualan obligasi tentu akan menguntungkan Emiten, namun bukan berarti setelah menjual obligasi, Emiten tidak melakukan upaya antisipasi terhadap kemungkinan buruk agar tetap mendapat peringkat tinggi dari lembaga pemeringkat. Sebab, jika sampai peringkat ini menurun, hal itu berpengaruh terhadap harga obligasi. Adapun konsekuensi terhadap *Go Public* itu sendiri terhadap Emiten antara lain yaitu:

1. Harus menunjuk Wali Amanat yang akan mewakili kepentingan Pemegang Obligasi.
2. Menyisihkan dana pelunasan obligasi (*sinking fund*), kewajiban melunasi pinjaman pokok dan bunga dalam waktu yang telah ditentukan oleh Emiten dan Wali Amanat.
3. Memberitahukan kepada Wali Amanat setiap perubahan yang terjadi yang dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan Emiten.

Meskipun obligasi dianggap sebagai investasi yang aman, namun tetap obligasi juga memiliki risiko. Salah satu risiko dari transaksi obligasi adalah *default risk* yaitu keadaan dimana suatu Emiten tidak mampu memenuhi kewajiban atau mengalami gagal bayar. Jika suatu Emiten gagal bayar, maka Investor akan menerima pengembalian obligasi lebih sedikit dari yang dijanjikan. Hal lain yang membentuk persepsi masyarakat terhadap obligasi juga tergantung dari kondisi ekonomi makro, karena harga obligasi sangat tergantung dari tingkat bunga yang berlaku ataupun kebijakan inflasi yang ditentukan pemerintah, serta dalam hal peringkat obligasi.

Apabila Debitor telah mendapat pinjaman dari seorang atau lebih Kreditor dan Para Pihak telah menyepakatinya dalam sebuah perjanjian tertulis, pastinya ada hak dan kewajiban antara Debitor dan Kreditor, seperti jangka waktu perjanjian, jumlah pinjaman, nominal pembayaran, pilihan domisili hukum dan masih banyak sesuai dengan kesepakatan Debitor dan Kreditor. Namun pada praktiknya dalam jangkawaktu perjanjian tersebut kerap sekali antara Debitor maupun Kreditor melanggar apa yang menjadi kewajibannya, dimana yang sering terjadi adalah Debitor yang wanprestasi dalam hal pembayaran.

Hal inilah yang sering membuat Kreditor melakukan upaya hukum terhadap Debitor yang wanprestasi, baik secara pidana maupun perdata. Dalam hal Kreditor melakukan upaya hukum secara perdata dapat dengan cara mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan terkait, serta dapat juga mengajukan permohonan Pailit maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan tata cara dan syarat yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Hukum Acara Kepailitan dan PKPU di Pengadilan Niaga tentunya menghadapkan antara Kreditor dan Debitor, baik itu melalui kuasanya atau prinsipal langsung. Dalam hal Pemegang Obligasi ingin mengajukan upaya hukum kepada Debitor yang wanprestasi, Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan-peraturan terkait lainnya mengisyaratkan bahwa pengajuan upaya hukum tersebut harus melalui Wali Amanat, aturan ini berlaku efektif sejak ditandatanganinya Kontrak atau Perjanjian Perwaliamatan antara Emiten dengan Wali Amanat. Perjanjian Perwaliamatan secara tegas menyebut bahwa Wali Amanat telah sepakat dan

mengikatkan diri untuk mewakili pemegang obligasi dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang obligasi tersebut, termasuk melakukan penuntutan hak-hak Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Pemegang Obligasi yang dimaksud.

Namun dalam praktiknya, seringkali ditemukan berbagai benturan pelaksanaan atau ketidaksesuaian antara aturan yang telah diciptakan oleh otoritas yang berwenang dengan penerapan hukum di masyarakat akibat adanya perbedaan kepentingan Para Pihak yang terlibat didalamnya. Salah satu problematika yang terjadi antara Emiten dengan Pemegang Obligasi yaitu ketika Pemegang Obligasi menunjuk kuasa dalam mengajukan upaya hukum terhadap Emiten yang mengalami gagal bayar atau wanprestasi. Dimana seharusnya Wali Amanatlah yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan⁶. Peraturan terhadap siapa yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi, tertuang dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Dalam implementasinya, ada penerapan yang keliru terkait dengan penerapan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang mana apabila Pemegang Obligasi ingin melakukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau Kepailitan terhadap Debitor yang gagal bayar harus diwakili oleh Kuasanya dalam hal ini yaitu Wali Amanat. Aktualnya, permasalahan tersebut dapat kita temui dalam pertimbangan hakim melalui Putusan Nomor:

⁶ Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

121/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst antara PT. Asuransi Asset Management (Pemohon PKPU I) dan PT. Asuransi Simas Jiwa (Pemohon PKPU II) yang keduanya bertindak sebagai Pemegang Obligasi (Kreditor) yang mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut dilakukan melalui kuasa dari Direktur Utama PT. Asuransi Asset Management dan Direktur yang dikuasakan ke sebuah kantor hukum. Hal tersebut seolah tidak memberikan kepastian kedudukan hukum (*legal standing*) dari Wali Amanat dan bertolakbelakang dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang mengatur bahwa pihak yang berwenang mewakili kepentingan Pemegang efek bersifat utang atau obligasi ialah Wali Amanat yang tertuang dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai dikotomi hukum atas **Kedudukan Hukum Wali Amanat Mewakili Pemegang Obligasi Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang- Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 121/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga.Jkt.Pst.**

1.2 Perumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum Wali Amanat dalam mewakili Pemegang Obligasi dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

2. Bagaimana implikasi hukum dari Putusan No. 121/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Dari Pemaparan diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisa kedudukan hukum Wali Amanat mewakili Pemegang Obligasi dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ;
2. Mengetahui dan menganalisa implikasi hukum dari Putusan No. 121/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

1.4 Metode Penelitian

Dalam pemecahan masalah yang ada dalam suatu penelitian diperlukan penyelidikan yang hati-hati, teratur dan terus-menerus, sedangkan untuk mengetahui bagaimana seharusnya langkah penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode penelitian.

Menurut I Made Wirartha, metode penelitian merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara-cara melaksanakan penelitian yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan,

menganalisis sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yang dilakukan dengan memilih bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini berpedoman pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan Perundang-Undangan, putusan-putusan pengadilan serta literatur-literatur yang ada seperti buku, jurnal, makalah, artikel dan tulisan ilmiah lainnya yang terkait dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Pendekatan peraturan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang, yurisprudensi atau putusan pengadilan dan regulasi lainnya yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian ini digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan

pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang mana penelitian ini membutuhkan pemahaman mengenai norma-norma yang terkait dengan pokok bahasan yang sedang diteliti, yang kemudian dijabarkan dalam bentuk tulisan. Istilah kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang pada hasil-hasil temuan, tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk lainnya.⁷

Berdasarkan sumbernya, maka penelitian ini disusun berdasarkan:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas seperti peraturan Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan Perundang-Undangan dan putusan hakim.⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
5. Keputusan Badan Pengelola Pasar Modal (BAPEPAM);
6. Putusan Nomor : 121/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

⁷ Anselm Strauss dan Julius Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 4.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 12, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hlm. 181.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat namun membahas dan menjelaskan topik terkait dengan pokok penelitian. Bahan hukum sekunder yaitu:

- a. Buku-buku hasil penelitian dan makalah;
- b. Literatur terkait;
- c. Pendapat dari para ahli hukum;
- d. Penelitian terdahulu;
- e. Jurnal Ilmiah;
- f. Perjanjian atau kontrak;
- g. Artikel Internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terutama mengenai istilah-istilah dengan tujuan untuk memberikan kemudahan atas pemahaman dari bahan-bahan hukum yang lainnya, digunakan sebagai pelengkap dari suatu informasi, seperti:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); dan
- c. Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan.

d. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik memperoleh bahan hukum dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti, maka teknik yang

digunakan yaitu dengan penelitian kepustakaan (*library research*) ialah kumpulan dari seluruh bahan hukum primer, sekunder dan non hukum yang diperoleh berdasarkan pokok permasalahan yang sedang diteliti dan dikaji secara komprehensif agar dapat digunakan untuk menjawab suatu pertanyaan atau memecah suatu masalah.⁹

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode analisis bahan hukum yang tidak menampilkan angka-angka sebagai hasil penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam bentuk tulisan. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum kemudian diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi:

- a. Gramatikal yakni penafsiran dengan mencari arti kata-kata yang memang sudah tertuang dalam Undang-Undang.
- b. Sistematis yakni penafsiran pasal Undang-Undang atau peraturan lain dengan menghubungkan pasal-pasal lain dalam satu Undang-Undang atau pasal-pasal dalam Undang-Undang lain.¹⁰

⁹ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2009), hlm. 56.

¹⁰ I Made Pasek Diante, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 154.